

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PPID PELAKSANA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANTUL**



**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2022**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANTUL

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pentingnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan pelayanan dan pemberian informasi. PPID berperan dalam memenuhi kebutuhan publik, baik secara langsung atau tatap muka, serta secara online untuk menjamin informasi publik. Cara ini dirancang untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas adalah dengan terus melakukan sosialisasi dan pelatihan penguasaan dari sistem aplikasi yang disediakan. Era keterbukaan informasi saat ini, publik semakin pintar dan bijak dalam menggunakan informasi, terutama dalam kaitannya untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Publik menginginkan adanya pemerintahan yang transparan, yang menekankan adanya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara. Sementara itu, pemerintah juga memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul berkomitmen untuk memberikan layanan PPID sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang KIP, meskipun dalam keterbatasan personil di Stewan Bantul, PPID tetap dilayani sebagaimana hak masyarakat untuk mengetahui informasi tentang pemerintahan, tentunya dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU KIP.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Bantul masih menjadi satu dengan ruang pelayanan Bagian Umum Sekretariat DPRD tepatnya pada subbagian Humas, Protokol dan Publikasi. Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul memiliki meja *Front office* yang berada di Lobi Gedung DPRD Kabupaten Bantul, pemohon PPID manual akan diterima oleh petugas *Front Office* lalu akan diarahkan ke Bagian Umum pada subbagian Humas Protokol dan Publikasi.

Pada layanan online, pelayanan PPID dilayani dengan berbagai media online, seperti media sosial DPRD Kabupaten Bantul yang terdiri dari IG Youtube dan Facebook. Permohonan data informasi oleh pemohon akan dipenuhi dan diberikan melalui media yang digunakan oleh pemohon. Selain media sosial, layanan online pelayanan data oleh sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dilayani dengan Nomor WA operator Humas Protokol sekretariat DPRD Kabupaten Bantul [https://bit.ly/Humas DPRD Bantul](https://bit.ly/Humas_DPRD_Bantul). Permintaan informasi publik di Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tahun 2022 seputar peraturan daerah tentang DPRD dan agenda kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantul.

Selain warga masyarakat kabupaten Bantul yang menanyakan informasi DPRD Kabupaten Bantul dan informasi kegiatan di sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, DPRD Kabupaten Bantul juga melayani permintaan Data oleh DPRD dari Kabupaten/Kota Lain yang ingin sharing perihal pemerintahan kepada DPRD Kabupaten Bantul. Pada tahun 2022

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul menerima 893 kunjungan dengan total peserta berkisar 12.909 peserta. Menurut data yang terekam dalam formulir kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bantul. Beberapa informasi yang sering diminta tentang Renja DPRD, Jadwal Agenda DPRD yang tertuang dalam Banmus dan Laporan Kinerja DPRD Kabupaten Bantul.

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.

Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana SEKRETARIAT DPRD, Kabupaten Bantul ada 5 (lima) orang dengan kualifikasi berpendidikan 4 (empat) orang sarjana, 1 (satu) orang Pasca Sarjana. Personil tersebut terbagi dalam 2 (dua) orang yang bertugas sebagai Front Office yang akan mengarahkan pemohon informasi ke petugas dalam dan 3 (tiga) orang di subagian Humas protokol dan Publikasi bertugas memberikan informasi yang dikehendaki oleh masyarakat.

Dalam memenuhi kebutuhan informasi, petugas dari subagian humas protokol dan publikasi bekerjasama dengan bagian-bagian yang ada di sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, sesuai dengan bidang informasi yang dikehendaki oleh masyarakat.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya. Kegiatan PPID Pelaksana SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara khusus, pelaksanaan kegiatan PPID masuk dalam kegiatan kehumasan.

Pelaksanaan kegiatan PPID di sekretariat DPRD kabupaten Bantul tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat melalui permohonan resmi, namun sekretariat DPRD juga melaksanakan Publikasi terhadap berbagai informasi yang dipandang merupakan kebutuhan publik.

REFLEKSI 2022 DAN PROYEKSI 2023 KABUPATEN BANTUL

Pemulihan Ekonomi Masih Jadi Fokus

Sudah dua tahun lebih pandemi Covid-19 menghantam sendi kehidupan yang tak hanya berdampak pada memurnya kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga kendiri perekonomian daerah. Pada 2022, Kabupaten Bantul masih memprioritaskan peran anggaran sebagai untuk pandemi Covid-19.

penggunaan, pembentukan peraturan daerah dan penganggaran sebagai hal yang utama. "Kalaupun ada kegiatan lain, itu akan sangat terbatas," kata Hanning Raharjo, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. Penganggaran dan penganggaran pada 2023 fokusnya tetap masih pemulihan ekonomi. Dalam pemeliharaan ekonomi tersebut, pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk menghidupkan kembali daya tarik wisata yang menjadi penguat pembangunan ekonomi dan nilai-nilai budaya Bantul, yakni ekowisata, industri, dan pariwisata.

Penyumbang PDRB
Ketika sektor ini menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah di Bantul serta memiliki populasi yang besar dan masyarakat Bantul serta paling banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Dan terbukti selama pandemi Covid-19, ketiga sektor tersebut masih bisa bertahan.

Pertanian, untuk hal ini pemerintah akan mengoptimalkan hasil produksi pangan dan lahan menggunakan input. Selain itu produksi hasil di Bantul akan terus ditingkatkan. Kemudian untuk sektor pariwisata, pemerintah akan meningkatkan promosi wisata sebagai lahan pertumbuhan penghasil lapangan (LPS) yang saat ini akan segera dilindungi melalui Perda agar LPS tetap tidak terancam hilang. "Kita akan mempromosikan wisata melalui jalan baru sebagai lahan pertanian dan pangan. Selain mempertahankan lahan pertanian dan pangan berkeadilan juga perlu mempertahankan sumber daya manusia (SDM) pertanian agar ada regenerasi."

Menteri Hanning akan memusatkan peran-peran baru cukup baik, salah satu upaya yang harus dilakukan di era saat ini upaya generasi muda masa depan di lahan pertanian adalah melalui mekanisasi pertanian.



DPRD KABUPATEN BANTUL

"Melalui anggaran dan peran penuh seperti ombudsman, pemantauan dan audit melalui media atau lainnya. Atau bisa juga pengawasan kepada para petani, perikanan, jalan tol, serta memperhatikan akses modal bagi para petani untuk kegiatan bibit maupun pupuk."

"Kita akan dukung pembangunan dari tiga sektor tersebut baik pertanian, perikanan dan industri. Tapi harus konsisten dan Perda Bantul baik dari sisi penganggaran maupun kebijakan," kata Hanning.

Ketika, sektor pariwisata. Menteri Hanning paripurna di Bantul masih menjadi andalan dalam pembangunan. Hal itu bisa dilihat jalan-jalan di Bantul baik jalan Parangtritis, jalan Imogiri Barat dan Jalan Imogiri Timur, serta jalan Bantul seluas rami setiap akhir pekan. "Pengembangan daerah dari sektor wisata juga cukup menjanjikan bisa mencapai Rp12 miliar dalam setahun."

Angka itu bisa dari wisata, belum lagi pendapatan yang dari wisatawan di lokasi objek wisata sehingga dapat meningkatkan hasil para pelaku usaha yakni kecil dan menengah (UMKM) Bantul, karena itu pemerintah akan melakukan program dari berbagai sektor 50% modal dari berbagai wisata, sehingga bisa jadi, maupun wisata pedesaan.

Di samping itu pada tahun depan wisatawan akan meningkat karena wisata lebih dari dua tahun ini seruan karena pandemi Covid-19. Karena itu Badan Anggaran (Badan) DPRD melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan mengoptimalkan agar ada kemandirian, serendah mungkin wisata.

Menyempatkan Tenaga Kerja

Hanning, sekretaris Daerah, mengatakan industri merupakan salah satu sektor yang menyerap banyak tenaga kerja di Bantul, karena itu ia meminta Perda Bantul untuk mempromosikan industri melalui Industri Program Nasional. Selain itu juga Bantul merupakan pusatnya industri karena seperti wilayah lain, baik pada produk dan jasa, dari industri yang bisa tumbuh, kegiatan upang, grab, dan warung gubek.

Bahkan saat ini industri kerja tumbuh sedang dibantu oleh Organisasi Pendidikan, Kejuruan, dan Kebudayaan Pekerjaan Bangsa-Bangsa (International Education, Scientific and Cultural Organization) (INESCO).

UNESCO sebagai salah satu jejaring kerja internasional. Untuk itu wajar karena Bantul salah satunya sebagai kabupaten/kota/daerah di Indonesia pada 2017 oleh Badan Nasional Kemitraan (BANK) Indonesia.

Selain itu Bantul juga telah ekopor kegiatan kerja di IKA. Dengan memusatkan ada sekitar 20.000-an industri yang akan memperkaya bisa sampai enam orang yang menyerap. "Jadi akan meningkatkan lapangan kerja, sektor industri juga meningkatkan lapangan kerja," kata Hanning.

Ketika Dinas Perikanan Kabupaten Bantul (DPRD) Bantul, Hanning Raharjo mengatakan masyarakat dan pemerintah bisa membantu untuk bangkit dari pandemi Covid-19. Sejak pertengahan 2022 sampai saat ini ekonomi kembali bangkit secara perlahan meski masih dalam kondisi pandemi.

Berkontribusi ada banyak peluang, meski demikian Pemerintah Kabupaten Bantul tetap menekankan kewaspadaan. Saat ini status Bantul berada dalam Periode Pemulihan. Pemulihan Kegiatan Masyarakat (PKM) Level 3. Upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 akan dipantau, salah satunya dengan pengujian capaian tes. "Harapannya semoga pandemi ini segera berakhir menjadi endemik," kata Hanning, Kamis (9/12).

Hanning mengatakan Program Kerja 2023-2022 di Perda Bantul termasuk di DPRD Bantul. Untuk itu penganggaran pandemi seperti penganggaran kegiatan-kegiatan yang masih bisa diandalkan, misalnya kegiatan kerja, dan kemudian ke masyarakat. Namun demikian pekerjaan berjalan baik.

Berbagai target juga dapat memulihkan baik pemeliharaan peraturan daerah, evaluasi, penganggaran, dan penganggaran. Sehingga masih ada sedikit Perda yang disahkan selama tahun ini. Sementara Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas tahun depan sebanyak 11 capaian yang merupakan hasil atau usulan dari Perda usulan dari DPRD. "Tiga tahun setelah Demokrasi Indonesia



Pimpinan DPRD Bantul bersama Bupati dan Wakil Bupati Bantul saat menyempatkan APBD 2023 dalam Rapat Paripurna, beberapa waktu lalu.

Perda yang Disahkan DPRD Bantul pada 2022

1. Perda Perubahan Renda atau Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Revisi Peraturan Tertentu.
2. Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Perda Penyelenggaraan Banjaran Gedung.
4. Perda Penyelenggaraan Kabupaten Liris Anak (KLA).
5. Perda Regulasi Keuangan Daerah.
6. Perda Penyelenggaraan Badan Usaha Milk Katurahan (GMBK).
7. Perda Perubahan atau Perda Kabupaten Bantul Nomor 51 Tahun 2015 tentang Jaringan Liris Liris dan Angkutan Jarak.
8. Perda Penyelenggaraan Modal Daerah pada BUMD.
9. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

RANCANGAN APBD 2023
Berdasarkan Usulan Bupati Bantul dan Masih dalam Evaluasi Gubernur DIY

Rencana Pendapatan Daerah

Sumber: Rp2.059.928.276.683
Tahun: Rp82.880.758.950
atau 3,97% dari pendapatan APBD Murni 2022

Pendapatan tersebut terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp508.804.008.396 sama dengan PAD tahun lalu.
- Kontribusi transfer daerah: Rp1.545.124.268.287.
- Lain-lain pendapatan daerah: Rp6.000.000.000.

Rencana Belanja Daerah

Sumber: Rp2.263.657.850.392, atau Rp16.243.785.338 atau 0,72% dari belanja APBD Murni 2022.

Belanja daerah terdiri dari:

- Belanja operasional sebesar Rp1.766.040.886.015.
- Belanja modal: Rp168.614.902.438.
- Belanja tidak terencana: Rp20.699.759.589.
- Belanja transfer: Rp308.302.302.350.
- Defisit: Rp203.729.573.709.

Melindungi Pedagang Kecil

Ketika Dinas Perikanan Kabupaten Bantul (DPRD) Bantul, Hanning Raharjo mengatakan pemerintah perlu perhatian di pasar-pasar tradisional di Bantul untuk melindungi pedagang kecil.

Ada sekitar 30 pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Keberadaan pasar-pasar tradisional tersebut harus dilindungi karena masih dihormati oleh masyarakat baik pedagang maupun pembeli. Selain itu pasar tradisional juga berfungsi untuk menjaga kearifan lokal.

"Pengembangan daerah 2023 hendaknya berfokus pada program pengurangan kemiskinan ekonomi, peningkatan kualitas SDM pendidikan dan kesehatan," ujar Hanning.

Tak hanya itu saja, proyek 2023, pembangunan kesehatan dilakukan pada program-program penganggaran melalui penyediaan layanan usaha, berkolaborasi pemerintah dan swasta, melindungi industri dan pengapalan dari kegiatan, pengapalan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Dorong Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Infrastruktur

BANTUL, Jolo Jolo - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun 2023, kini di fokuskan pada peningkatan infrastruktur daerah. Oleh sebab itu, APBD 2023 untuk infrastruktur menjadi fokus dalam anggaran Tahun 2022. Hal ini lantaran pemulihan ekonomi menjadi semangat program-program yang terdapat dalam APBD 2023 guna mengoptimalkan pemulihan ekonomi.

Hal ini lantaran pemulihan ekonomi menjadi semangat program-program yang terdapat dalam APBD 2023 guna mengoptimalkan pemulihan ekonomi. Selain itu, APBD 2023 untuk infrastruktur menjadi fokus dalam anggaran Tahun 2022. Hal ini lantaran pemulihan ekonomi menjadi semangat program-program yang terdapat dalam APBD 2023 guna mengoptimalkan pemulihan ekonomi.

Hal ini lantaran pemulihan ekonomi menjadi semangat program-program yang terdapat dalam APBD 2023 guna mengoptimalkan pemulihan ekonomi. Selain itu, APBD 2023 untuk infrastruktur menjadi fokus dalam anggaran Tahun 2022. Hal ini lantaran pemulihan ekonomi menjadi semangat program-program yang terdapat dalam APBD 2023 guna mengoptimalkan pemulihan ekonomi.

Hal ini lantaran pemulihan ekonomi menjadi semangat program-program yang terdapat dalam APBD 2023 guna mengoptimalkan pemulihan ekonomi. Selain itu, APBD 2023 untuk infrastruktur menjadi fokus dalam anggaran Tahun 2022. Hal ini lantaran pemulihan ekonomi menjadi semangat program-program yang terdapat dalam APBD 2023 guna mengoptimalkan pemulihan ekonomi.



Hanung Raharjo
Ketua DPRD Bantul



Salah satu kegiatan DPRD Bantul dalam rangka sosialisasi APBD 2023 kepada masyarakat.

Pendidikan & Kesehatan Tetap Jadi Perhatian

BANTUL, Jolo Jolo - Abaikan anggapan Presiden Jokowi bahwa sektor pendidikan dan kesehatan adalah sektor yang paling lambat pulih pasca pandemi, DPRD Bantul tetap menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas dalam APBD 2023.

Menurut data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul, APBD 2023 pada sektor pendidikan dibelanjakan sebesar Rp608.356.314.496, sedangkan pada sektor kesehatan Rp244.697.262.092. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi fokus utama dalam APBD 2023.



Nur Subiyantoro
Wakil Ketua DPRD Bantul

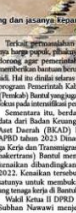
Melalui Pariwisata & Pertanian Bangkitkan Masyarakat

RAMA: Suasana tepian pantai saat dipadati pelaku UMKM sebagai ajang pameran dan penjualan barang dagangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan wisata.

RAMA: Suasana tepian pantai saat dipadati pelaku UMKM sebagai ajang pameran dan penjualan barang dagangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan wisata.

RAMA: Suasana tepian pantai saat dipadati pelaku UMKM sebagai ajang pameran dan penjualan barang dagangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan wisata.

RAMA: Suasana tepian pantai saat dipadati pelaku UMKM sebagai ajang pameran dan penjualan barang dagangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan wisata.



Subhan Nurwani
Wakil Ketua DPRD Bantul



Kegiatan pasar malam di pantai yang ramai dikunjungi masyarakat.

Artikel berita dengan judul 'Sering Blusukan di Pelosok, Intens Mendampingi Pelaku UMKM'. Artikel ini membahas upaya DPRD Bantul dalam membantu pelaku UMKM, termasuk kunjungan ke lokasi usaha dan pendampingan teknis.

Artikel berita dengan judul 'Dorong Fokus Anggaran untuk Tingkatkan Ekonomi Masyarakat'. Artikel ini membahas prioritas anggaran APBD 2023 untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Gambar 1. Publikasi kegiatan Pimpinan DPRD di Media Cetak.

Komisi A DPRD Bantul Berharap Pilir Berjalan Aman dan Damai

Komisi A DPRD Bantul berharap Pemilihan Lurah (Pilir) serentak yang dilaksanakan di 21 kalurahan dan 12 kaparewon dapat berjalan aman, damai, dan lancar. Pilir serentak akan digelar pada Minggu, 25 September mendatang.

Ketua Komisi A DPRD Bantul, Muhammad Agus Salim mengatakan dari hasil pemantauannya selama tahapan Pilir mulai dari pendaftaran calon lurah, masa kampanye, hingga hari tenang ini di semua kalurahan yang menggelar Pilir secara umum berjalan lancar, aman, dan damai.

Berkaitan dengan masa tenang sebelum Pilir, pihaknya sudah beberapa kali menyampaikan kepada semua calon lurah untuk menghindari pengabaian massa maupun politik uang karena bisa merusak demokrasi.

"Kemudian juga harapkan kami kader-kader di masing-masing calon lurah bisa mematuhi regulasi atau aturan di masa hari tenang untuk tidak melakukan mobilisasi massa dukungan. Karena hari ini sampai 24 sudah masa hari tenang," kata Agus Salim, saat dihubungi Kamis (22/9).

Masa tenang kampanye berlaku mulai 22-24 September. Sementara penugutan suara berlangsung pada 25 September.

Tidak hanya masa kampanye dan juga masa tenang politik, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga berharap pascapengumuman suara pada 25 September mendiang semua calon lurah.

Nuryani Priyanto berharap proses Pilir serentak 25 September mendiang berjalan baik dan lancar serta partisipasi masyarakat untuk memilih calon lurah juga tinggi dan harapannya terpilih pemenang yang baik sesuai dengan harapan masyarakat.

Setelah Pilir, politikus PKS ini berharap ada rekonsiliasi yang dilakukan semua calon lurah maupun pendukungnya. Menurutnya perbedaan pilihan jangan sampai menjadikan konflik yang berkepanjangan di masyarakat. "Yang menang ojo umuk (jangan sombong) dan yang kalah ojo ngamuk (jangan marah)," katanya.

Berdasarkan hasil monitoring dari sejumlah kalurahan yang menggelar Pilir di kalurahan sejauh ini cukup lancar, warga cukup antusias mengikuti penyampaian visi misi dari calon lurah di masing-masing kalurahan. Meski ada beberapa perbedaan pilihan namun masih dalam tahap wajar.

Sebelumnya Bupati Bantul Abdul Halim Mualim juga sudah meminta kepada semua calon atau kandidat lurah dalam Pilir serentak pada 25 September mendiang untuk siap kalah dan siap menang. Halim juga meminta kepada para kandidat atau calon lurah diharapkan dapat mengendalikan basis massa pendukungnya untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan. Setiap kompetisi tentu ada yang kalah dan ada yang menang.

Setiap kandidat harus siap dengan realitas hasil yang ada nantinya, sehingga setelah pelaksanaan pilhan lurah selesai semuanya akan berjalan seperti semula, "kata Halim. (4)

Kegiatan Komisi A DPRD

maupun masing-masing pendukungnya bisa menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa utamanya masyarakat di tingkat bawah.

Ia meminta yang menang untuk tidak jemu atau sombong. Demikian yang kalah juga tidak ngamuk melainkan menerima hasil Pilir dengan lapang dada. Kemudian juga perlu adanya rekonsiliasi seluruh peserta calon lurah supaya kondusifitas warga di tiap kalurahan yang menggelar Pilir bisa kembali seperti semula," ucapnya.

Agus Salim juga mewanti-wanti semua pamong kalurahan, mulai dari ASK, Badan Penyelenggaraan Kalurahan (Bansukal), hingga kepala dusun untuk berlaku netral dalam Pilir demi menjaga keberlangsungan Pilir yang berkualitas dan luhur yang terpilih benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat.

"Kami sudah imbau dari awal bahwa netralitas pamong kalurahan dalam Pilir ini merupakan harga mati. Karena jika tidak netral akan ada sanksinya," ujarnya.

Anggota Komisi A DPRD Bantul, Teguh Santosa menambahkan masa kampanye sudah dilalui, sudah berjalan aman, tertib, dan lancar. Ia meminta semua calon lurah bisa memahami aturan yang ada. Selain itu politikus Golkar ini juga meminta semua calon lurah maupun pendukungnya untuk menjaga kerukunan bersama karena semua warga merupakan saudara, karena semua calon lurah juga sama-sama ingin memberikan yang terbaik untuk kalurahan mereka masing-masing.

"Saling menerima baik yang menang maupun kalah," ucapnya.

Anggota Komisi A DPRD lainnya, Sigit

Gambar 2. Publikasi Kegiatan Komisi A DPRD Kabupaten Bantul

DPRD Bantul Dorong Anggaran untuk Kebangkitan Ekonomi Rakyat

Ten kebangkitan ekonomi sebagai lini masyarakat mulai terlihat sejak dengan penanganan kasus Covid-19.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul meminta tran pemulihan ekonomi masyarakat harus segera disambut dengan suntikan alokasi penganggaran ke arah kebangkitan ekonomi rakyat.

Ketua Komisi B DPRD Bantul, Wildan Nafis mengatakan selama dua tahun terakhir, anggaran pemerintah memang sangat dinamis untuk penanganan pandemi.

Haluh sebabnya, lantaran saat ini kasus Covid-19 berangsur membaik, melalui lings budgeting yang dibantu DPRD Bantul, alokasi anggaran sekarang seharusnya sudah mulai dirahkan ke arah pemulihan ekonomi.

Beberapa sektor ekonomi masyarakat yang membutuhkan perhatian tersebut, kata Wildan, di antaranya bidang pariwisata, perdagangan dan pertanian. Di sektor perdagangan, Wildan menyoroti Dinas Perdagangan yang sebelumnya masih berdiri sendiri tetapi sekarang sudah menjadi salah satu bidang di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Padahal menurut Wildan, Bantul memiliki banyak pasar. "Secara cronis karena dulu dinas Dinas Perdagangan sekarang menjadi bidang, pasti anggarannya juga berkurang. Ini yang menjadi kekhawatiran kita. Ini harusnya mendukung pemulihan ekonomi, tetapi karena faktor regulasi, sehingga mau tidak mau harus menyesuaikan," ucap dia.

Kendali segala, Wildan berharap sektor perdagangan tetap diberi alokasi anggaran yang tepat. Khususnya mendukung berbagai aktivitas perekonomian pasar, seperti perbaikan dan perawatan pasar.

Salah satu pasar rakyat yang selesai di revitalisasi adalah Pasar Tun, Sidiomoyo, Bantangpuro. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Bantul, Agus Sulistyana menerangkan bila pasca revitalisasi Pasar Tun dibuktikan sistem zonasi sesuai komoditas barang yang dijual.

Sektor Pertanian

Sementara di sektor pertanian, sejumlah petani Bantul ikut serta dalam program pemerintah penanganan padi IP400. "Ini di Indonesia yang punya program IP400 besar itu hanya dua, Bantul dan wilayah Jawa Barat," ujarnya.

Mengingat program IP400 yang bagus untuk petani, Wildan meminta pemerintah daerah harus memberi dukungan penuh untuk kelancaran program ini. Pasalnya IP400 dilaksanakan lahan yang dulunya setahun lahan bud daya dapat dipanen tiga kali kini menjadi empat kali.

Kepta DPUPKP Bantul, Bobot Anif Adini menerangkan bila dukungan terhadap program IP400 dibenarkan oleh DPUPKP Bantul dalam bentuk penyediaan air. Sesuai dengan garis kerjanya, DPUPKP akan ambil bagian dalam menyiapkan ketersediaan air bagi petani yang terlibat IP400. "Kalau sesuai dengan bidang kami dibenarkan terkait penyediaan air. Penyediaan air rigas, ini juga upaya untuk mendukung petani bisa terlindungi," terangnya.

Selain penyediaan kebutuhan air, beberapa perbaikan saluran rigas pertanian pun akan digulirkan pada tahun ini.

Kebangkitan Pariwisata

Sementara di sektor pariwisata, Wildan menyebutkan bila pariwisata menjadi salah satu sektor paling terdampak. Dampak paling kentara ialah tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata selama pandemi.

"Terkait dengan pemulihan ekonomi, kami yang terdampak paling keras adalah dari sektor wisata. Sektor wisata kami PAD-nya turun drastis. Dari target Rp31 miliar hanya tercapai ke kisaran Rp14 miliar. Ini kan sepehar saja enggak sampai," kata politikus Partai Amanah Nasional (PAN) lu, Sabti (16/4). Wildan memohonkan sarana prasarana tempat pariwisata di Bantul dan peraturan yang dulunya belum mendukung sektor wisata seharusnya sudah mulai disesuaikan. Termasuk kenaikan retribusi pariwisata. "Di situ lah nanti anggaran pemerintah harusnya sudah mulai ke pemulihan ekonomi. Harus ada target di situ," kata dia.

Gayung berambut, beberapa strategi pemulihan ekonomi sektor wisata 2022 telah diwacanakan Dinas Pariwisata (Dispar) Bantul. Kepala Dispar Bantul, Kwartiryo Huru Prabowo menyampaikan di tahun ini bila memungkinkan direncanakan kegiatan-kegiatan pendongkai wisata bakal digelar. Adapun bentuknya bisa meliputi atraksi, kegiatan dengan komunitas, hingga Festival Segoro Kidul. "Ini juga upaya untuk mendorong wisata. Bagaimana kami juga memperkuat kerja sama dengan teman-teman agen perjalanan di Asia untuk membuat paket-paket wisata mengarah ke desa-desa" ucap dia. (7)

Komisi B DPRD Bantul

Komisi B Dorong Anggaran untuk Kebangkitan Ekonomi Rakyat

Gambar 3. Publikasi Kegiatan Komisi B DPRD Kabupaten Bantul

INFO PARLEMEN BANTUL

Komis C DPRD Bantul Soroti Wilayah Perbatasan

Berkomitmen Infrastruktur Setara dengan Wilayah Tetangga

Pembangunan infrastruktur mulai bergulir masif lagi. Setelah dua tahun pandemi Covid-19, Komisi C DPRD Bantul pun mendorong pembekap memperhatikan kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan. Terutama jalan.

YA, kondisi sebagian ruas jalan di wilayah perbatasan Bantul cukup memprihatinkan. Baik wilayah perbatasan Kabupaten Bantul dengan Kota Jogja maupun Kabupaten Sleman. "Memang banyak yang 'ngomong begini,'" jelas Ketua Komisi C DPRD Bantul Dwi Kristiantoro di ruang kerjanya kemarin (26/9).

Dwi sendiri kerap melintasi beberapa wilayah perbatasan. Hasilnya, Dwi melihat kualitas infrastruktur jalan raya milik Kabupaten Bantul dibanding Kabupaten Sleman maupun Kota Jogja memang jomplang. Salah satunya ruas jalan di Kaparawon Kaohlan. Peristiwa di Pedukuhan Gatak.

"Ini Bantul jalannya kecil dan bergelombang. Begitu rusak Sleman, jalannya lebar dan halus," ucapnya. Ruas jalan ini, perbaikan PDI Perjuangan ini meyakini sebetulnya diperbaiki. Sehingga dibebaskan. Lantaran ruas jalan ini sangat padat. Terutama saat pagi dan sore hari.

Tak jarang pula, ruas jalan itu dilintasi kendaraan besar. Seperti tronton. Maklum, Kaparawon Tamanan itu tidak hanya padat penduduk. Sebagian wilayahnya juga banyak berdirinya pabrik dan gudang.

"But sipis mobil kendaraan pribadi saja sudah semuanya harus

Hal ini bisa mengganggu program-program lain. "Padahal, program-program lain juga sama pentingnya," ujarnya.

Karena itu, Dwi berpendapat perlu upaya lain agar rencana ini bisa teralisasi. Caranya dengan mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. "Kalau Kabupaten Bantul bisa memperoleh DAK, ruas jalan itu bisa dibangun pada 2024," ucapnya optimis.

Selain dengan DPUPK, kata Dwi, Komisi C juga sering membahas pembangunan dan penataan wajah wilayah perbatasan dengan dinas lingkungan hidup (DLH). Lantaran wajah wilayah perbatasan perlu diperbaiki dengan taman. "Har ada estetikanya," katanya.

Dalam kesempatan ini, Dwi juga menyebut ada alokasi anggaran perbaikan ruas jalan untuk wilayah perbatasan pada APBD 2022. "Kalau

salah satu ruas jalan di Kaparawon Selayu dan Kaohlan.

Dwi memastikan Komisi C terus memperhatikan wilayah perbatasan. Karena itu, Komisi C bakal mendorong pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur untuk wilayah perbatasan. "Secara bertahap pasti infrastruktur Kabupaten Bantul nanti bisa sama dengan kabupaten lain," tambahnya.

Selain diungkapkan Anggota Komisi C DPRD Bantul Arni Tyan Palagi. Menurutnya, jomplangnya kualitas infrastruktur tidak hanya jalan kabupaten. Melainkan juga jalan-jalan kampung.

Polidhan Parta Golkar ini rutin blusukan ke beberapa kabupaten. Di antaranya Kaparawon Selayu dan Kaohlan. Hasilnya, tidak sedikit warga yang mengkilang bantuan perbaikan jalan kampung. "Seperti di Kalurahan Ngrotharjo utara inggrosi itu banyak. Kemudian wilayah Selayu pingiran Sungai Progo," katanya.

Selain ruas jalan, kata Arni, wilayah perbatasan juga perlu mendapatkan perhatian lain. Di antaranya pemasangan lampu penerangan jalan umum dan pembangunan taman.

Dari pengalaman blusukan, Arni berpendapat sebagai warga masih kebanyakan perbaiki tata cara dengan potret estetik. "Kalau sudah mengetahui cara memperbaiki bangunan, ke depan mereka kan bisa lebih enak," tegasnya.

Sant blusukan, Arni kerap memulakan seragam kemudiran kepada warga. Itu bertujuan untuk kebutuhan sarana infrastruktur di wilayahnya. Lebih dari itu juga peduli dengan potret estetik di sekitarnya. Menyusul beroperasinya Yogyakarta International Airport.

"Jangan sampai Kabupaten Bantul hanya menjadi penonton," ingatnya. (*/raming)

Gambar 4 Publikasi Komisi C DPRD Kabupaten Bantul

KOMISI D DPRD BANTUL

Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan

bangsa. Oleh karena itu, Komisi D DPRD Bantul bakal mengalokasikan anggaran 20% dari APBD Bantul tetap untuk diprioritaskan untuk sektor pendidikan.

"Jadi fokus perhatian dari Komisi D salah satunya terkait dengan pendidikan di Bantul. Mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP, sederajat. Oleh karena itu, DPRD Bantul dan pemerintah Kabupaten Bantul tentunya tidak mau ketinggalan disektor pendidikan," ujar Ketua Komisi D DPRD Bantul, Suratman ST, Rabu (16/11).

Politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan, bahwa pendidikan merupakan pondasi utama sekaligus tulang punggung masa depan bangsa dan negara Indonesia. Karena dari situ, sebagai tempat membentuk karakter mental anak-anak menjadi pemimpin bangsa ke depan. "Satu yang perlu kita perhatikan adalah, kalau anak kita mau pintar itu tentunya fasilitas dan sarana pendukung sekolah harus tersedia dengan baik," ujar Suratman.

Dalam konteks ini Komisi D DPRD Bantul melihat, tahun ini terdapat beberapa sekolah. Khususnya pada SD, SMP fasilitasnya memang perlu diperbaharui oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Kondisi beberapa sekolah juga sangat mengawatirkan. Terkait rusaknya gedung dan sarana prasarana lainnya. Untuk itu kata Suratman, Komisi D DPRD Bantul minta kepada pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga perlu segera melakukan pendataan.

Karena beberapa sekolah SD, SMP di Kabupaten Bantul pembangunan sudah dilakukan beberapa tahun lalu. Hasil monitoring beberapa tempat sudah mulai rusak. Jangan sampai dalam kurun waktu yang akan datang sekolah itu akan rusak semua. Dengan kondisi tersebut tentunya akan memberatkan APBD. "Untuk itu saya minta kepada pemerintah Kabupaten Bantul untuk segera cek data. Berapa banyak sekolah yang rusak. Terus nanti selanjutnya kita alokasikan anggaran baik itu dari APBD atau dari Dana Alokasi Khusus (DAK)," jelasnya.

Suratman juga mengatakan, hasil inspeksi mendadak Komisi D DPRD Bantul menemukan SD Sawit sudah saatnya direhab. Dari aspek fasilitas gedung, sebel dan semuanya hampir 50% mesti ada diperbaiki. Selain itu ada juga SD 3 Bantul, sudah ada dua ruang kelas dikosongkan. Karena sangat mengkhawatirkan anak-anak, bahkan kegiatan belajar mengajar dihalangi ditempat aman. "Setiap ada pem-

bahasan di Komisi D Bapak Kepala Dinas saya minta untuk menyampaikan hal-hal yang itu perlu disampaikan. Terkait kebutuhan mendesak yang harus segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Menurut Suratman, tentunya sejak beberapa tahun lalu pembangunan gedung SD sangat sedikit sekali. Tentunya pemerintah untuk segera membenarkan perhatian khusus terhadap pendidikan yang ada di Kabupaten Bantul mulai jenjang PAUD, TK, SD dan SMP. Pendidikan merupakan tempat untuk membentuk karakter, mental anak. Oleh karena itu, dasarnya harus kuat, jika tidak kokoh nanti kedepannya juga kurang bagus. "Perhatian dari pemerintah Bantul saya kira sudah sesuai, karena pemerintah Bantul sudah membebaskan alokasi 20% dari APBD Bantul untuk pendidikan," jelas Suratman.

Kendati begitu, alokasi anggaran tersebut masih perlu ditambah. Oleh karena itu, Komisi D mendukung penuh, meski juga melihat kekuatan APBD Bantul.

Karena srah kedepannya, setiap sekolah yang punya lahan bisa diakibatkan anggaran untuk taman. Orientasi dari taman itu ialah mewujudkan rasa nyaman anak-anak dalam belajar.

"Komisi punya komitmen memperhatikan pendidikan dan sarana prasarana. Karena pendidikan dasar ini sangat penting. Namanya dasar atau pondasi itu memang harus kuat. Karena hal itu untuk membentuk karakter, mental anak, mulai jenjang PAUD, SD SMP, SMA hingga perguruan tinggi," jelasnya. (Roy)

Gambar 5 Publikasi Kegiatan Komisi D DPRD Kabupaten Bantul



Gambar 6 Publikasi Propemperda DPRD KABUPATEN Bantul

Publikasi terhadap informasi DPRD Kabupaten Bantul tidak sebatas pada media Cetak saja, namun Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul juga mempublikasikan informasi-informasi yang dipandang dibutuhkan oleh masyarakat melalui media elektronik Radio dan televisi.



Gambar 7 Publikasi Media Televisi untuk Pimpinan DPRD



Gambar 8 Publikasi Media Televisi untuk Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Bantul

Dalam kegiatan publikasi melalui media elektronik, masyarakat memiliki kesempatan untuk menanyakan langsung kepada Wakil Rakyat atau anggota DPRD Kabupaten Bantul tentang hal-hal yang ingin diketahui oleh masyarakat. Sebagai pendukung kegiatan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi PPublik, sekretariat DPRD Kabupaten Bantul juga mengundang dinas terkait dengan materi yang diinginkan, sehingga masyarakat dapat langsung mendalami permasalahan sesuai dengan tema diskusi.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul bertekad membetikan pelayanan keterbukaan informasi publik kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bantul, khususnya atau masyarakat Indonesia pada umumnya. Selain media cetak dan media elektronik lokal, sekretariat DPRD Kabupaten Bantul melalui kegiatan kehumasan juga mempublikasikan informasi-informasi publik melalui media online.

Berikut beberapa contoh publikasi oleh sekretariat DPRD Kabupaten Bantul untuk masyarakat pengguna jaringan internet.

<https://radarjoja.jawapos.com/bantul/2022/09/29/fokus-apbd-2023-untuk-pemulihan-ekonomi/>

Lebih Dekat dengan Hanung Raharjo ST

Fokus APBD 2023 untuk Pemulihan Ekonomi

29 September 2022 11:53 AM



APBD PERUBAHAN: Hanung Raharjo menandatangani berita acara perubahan KUPA-PPAD 2022 kemarin sore. (3/11/2022)

RADAR JOGJA – Pemulihan ekonomi. Itulah semangat program-program yang tertuang dalam rancangan APBD 2023. Harapannya, perekonomian Kabupaten Bantul pascapandemi Covid-19 bisa kembali pulih lebih cepat.

Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo ST menyebut, rancangan APBD 2023 memprioritaskan tiga sektor. Yakni, perindustrian, pertanian, dan pariwisata. Tiga sektor ini menduduki mayoritas warga Bumi Projo tamansari. "Sehingga tiga sektor ini harus dijejaki agar segera kembali bangkit," tegas Hanung di ruang kerjanya kemarin (26/9).

Beranda • D.I. Yogyakarta •

Dewan Minta Rencana Kenaikan Cukai Dipertimbangkan Kembali

Erna Sari - D.I. Yogyakarta
22 September 2022

Komentar



PANIK! Kauderil Sorma & Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bantul dengan Wakil pelaksana Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di ruang Rapat Komisi & DPRD Bantul pada Kamis, 22/09/22. (ERNA SARI, SUSANTI/OSLO JOGA)

Harian Jogja

HOME NEWS PEMILU 2024 JOGJAPOLITAN PENDIDIKAN EKSB OTOTEKNO WISATA SPA

Home > Bantul

APBD Perubahan 2022, Rasionalisasi Anggaran Mencapai Rp1,4 Miliar

Media Digital • Rabu, 19 Oktober 2022 - 18:51 WIB • Anief Jusaido



Wakil Ketua DPRD Bantul Nur Subianto (kanan) menyerahkan draft APBD Perubahan 2022 kepada Wakil Bupati Bantul (kiri) Pluntharu - Indonesia



DPRD KABUPATEN BANTUL

Penulis: Satriyati Wijaya • Editor: Sholihul Hadi • 13 Agu 2022, 18:40:07 WIB • 828 kali Dibaca • 0 komentar

Tahun 2023, Fokus pada Pemulihan Ekonomi

SHARE

Facebook Twitter Email LINE WhatsApp Telegram More

KORANBERNASJID, BANTUL -- DPRD Bantul menggelar Rapat Paripurno (Rapur) dengan agenda Penyampaian Laporan, Soran dan Pಂದapat Badan Anggaran dan Pengambilan

C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah permohonan informasi publik	5
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	15-20 mnt
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	5
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	-

Permohonan informasi publik di sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dapat terlayani dengan baik, masyarakat yang meminta informasi tersebut dapat menerima layanan dengan baik dengan waktu yang cukup singkat.

Beberapa informasi yang diinginkan masyarakat dapat segera dipenuhi karena pada dasarnya data tersebut sudah disediakan melalui fasilitas online, namun karena ketidaktahuan maka beberapa masyarakat mendatangi langsung kantor sekretariat DPRD Kabupaten Bantul.

Selain masyarakat yang menginginkan informasi secara langsung ke sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul juga melayani permintaan informasi melalui akun media sosial DPRD Kabupaten Bantul. Beberapa permintaan juga dapat kami berikan sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut. Tidak hanya masyarakat kabupaten Bantul, pemohon informasi juga berasal dari DPRD Kabupaten/Kota diluar DIY.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 Pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 Tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 Permohonan

4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 Putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 Gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 Putusan

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

- Kendala eksternal yang dihadapi adalah masih minimnya pemohon informasi di SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Bantul, dikarenakan PPID belum begitu dikenal oleh masyarakat luas. Minat masyarakat untuk mencari informasi publik di DPRD Kabupaten Bantul belum maksimal. Saat ini permintaan informasi banyak diminta oleh antar Lembaga DPRD dari luar daerah Kabupaten Bantul.
- Pemohon informasi di era saat ini lebih menginginkan informasi secara cepat dan langsung dilayani tidak dengan jeda waktu yang lama. Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul mencoba untuk mempublikasikan segala informasi yang berhak di akses oleh Masyarakat luas, disamping media sosial, subdomain DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul juga mengembangkan aplikasi jarimas sebagai wujud komitmen keterbukaan informasi publik di DPRD Kabupaten Bantul.

2. Kendala internal

- Keterbatasan SDM pada SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Bantul sehingga respon tentang PPID belum maksimal.
- Personil yang tergabung dalam tim layanan memiliki tugas dan fungsi (tusi) utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang diharuskan untuk menjalankan tugas utama sehingga tugas di PPID seringkali terabaikan.

**F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.**

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a) Perlu adanya petugas khusus untuk menangani permintaan informasi publik ke DPRD Kabupaten Bantul.
- b) Memperbanyak media informasi yang akan disampaikan kepada publik meskipun belum ada permintaan dari publik
- c) Memiliki ruang / desk pelayanan informasi tersendiri untuk pelayanan PPID.

Bantul, 29 Januari 2023
PPID Pelaksana



PRAPTANUGRAHA, S.SOS., MH.
NIP.197112171991011001

Lampiran I. **KEGIATAN PPID PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD**

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Menerima permintaan informasi manual	Januari – Desember
3	Rapat Koordinasi penerimaan permohonan informasi	Januari – Desember
4	Koordinasi pengelolaan website	Januari – Desember
5	Rapat-rapat penerimaan audiensi masyarakat	Januari – Desember
6	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Januari 2023